



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 50);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 50) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 75

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 50
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan antara lain:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

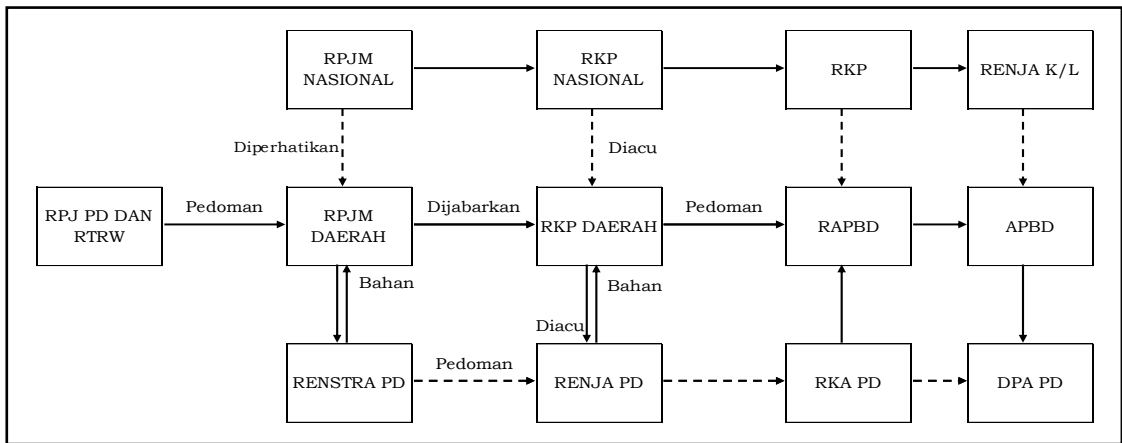
- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan Renstra.

Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya ke dalam program dan kegiatan. Kualitas Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan kemampuan Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, Rencana Strategis dan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar.1
Keterkaitan Renja, Renstra dan Dokumen Lainnya



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. RKPD digunakan sebagai pedoman/ acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2019-2024, dalam penyusunannya mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023. Selain mengacu kepada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023, Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023 yang fokus pada 5 (lima) program prioritas utama dalam rangka mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur serta mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Program prioritas utama dalam Rencana Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023 yang terkait dengan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023:

1. Bidang Sumber Daya Air yang fokus pada pemenuhan kebutuhan air baku, pengendalian banjir dan pengelolaan jaringan irigasi;
2. Bidang Jalan dan Jembatan yang fokus pada peningkatan konektivitas dan peningkatan aksesibilitas;
3. Bidang Permukiman yang fokus pada Pembangunan dan Peningkatan SPAM, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 juga mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dengan prioritas pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, *Jabar Zero New Stunting*, dan penanganan kemiskinan ekstrem. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yang terkait dengan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023g antara lain Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana dan Pengembangan Infrastruktur, Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selain mengacu dan dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan kepada rencana kerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yang memiliki tujuan Meningkatkan kinerja jaringan jalan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan, Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi dan Terwujudnya tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing, dengan sasaran prioritas:

1. Meningkatnya peran jalan dalam meningkatkan pengembangan wilayah;
2. Meningkatnya kemampuan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan Provinsi di Jawa Barat;
3. Meningkatnya kualitas sistem jasa konstruksi dan sumber daya manusia Jasa Konstruksi; dan
4. Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 akan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2023. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023 (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman

yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

31. Peraturan Bupati Garut Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 50);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah; dan
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Memuat hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan program dan kegiatan perubahan Renja Tahun 2023.

Bab IV Penutup

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta tindak lanjut pelaksanaan perubahan renja.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja melalui analisis terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Analisis dilakukan terhadap kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi. Evaluasi pencapaian tersebut akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, serta menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2023 melaksanakan 10 (sepuluh) program terdiri dari 9 (sembilan) program utama yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 1 (satu) program yang sifatnya *supporting* terhadap program utama, 20 (dua puluh) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan. Pada umumnya program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 masih di bawah rencana dengan capaian rata-rata kinerja sasaran sebesar **10,80%**. Capaian tersebut merupakan rata-rata capaian sasaran strategis yang diukur dari 11 (sebelas) indikator kinerja.

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik rencana maupun realisasi. Evaluasi ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output yang dihasilkan oleh suatu input tertentu yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya perbedaan maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Permasalahan yang terjadi selama proses pencapaian target kinerja sangat penting untuk diketahui, agar dapat ditetapkan langkah-langkah strategis sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama di tahun mendatang. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghadapi beberapa kendala masalah keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, kendala lahan, kendala cuaca, kinerja kontraktor yang kurang baik yang berpengaruh terhadap waktu penyelesaian pekerjaan dan terjadinya beberapa kejadian bencana alam pada Tahun 2023. Di samping itu, kurangnya pembinaan teknis, sarana dan prasarana, program pembiayaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja juga menjadi kendala dalam upaya perwujudan akuntabilitas kinerja.

Perwujudan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih rendah, hal ini diakibatkan oleh kurangnya koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha. Hal ini menyebabkan keseluruhan sumber daya yang ada tidak dapat digunakan secara optimal demi tercapainya kinerja yang maksimal. Di samping itu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdampak terhadap kualitas akuntabilitas kinerja program dan kegiatan. Untuk mengatasi masalah yang tersebut di atas, maka perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala bagi pegawai dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga kendala kekurangan SDM ini dapat teratasi dan akuntabilitas kinerja yang berkualitas dapat terwujud.

Permasalahan secara umum pada Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang antara lain pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, masih rendahnya produk hukum rencana tata ruang, masih banyaknya rumah dan gedung yang belum memiliki SLF dan PBG, konektivitas antar wilayah masih belum memadai, belum fungsionalnya jalan baru dan rendahnya cakupan pelayanan air minum dan sanitasi serta kerusakan infrastruktur yang terbangun akibat bencana alam maupun kualitas konstruksi yang rendah.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dirumuskan pemecahan masalah yang akan dilakukan diantaranya membuat kebijakan produk rencana tata ruang, meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang, memantapkan peran koordinasi perencanaan di tingkat kabupaten, meningkatkan kinerja penyelenggaraan jalan, sumber daya air, meningkatkan pengelolaan air minum dan sanitasi, percepatan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Irigasi dan Konservasi Sumber Daya Air
 Indikator/Target : Persentase Tampung Air yang Tersedia

Lembar : 1

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Kabupaten)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Capaian Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Triwulan I		Triwulan II											
									K	Rp	K	Rp										K
	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Tampung Air yang Tersedia	100	%	277.360.000.000	34,92	126.668.662.468	82,54	12.142.000.000	0	216.445.000	0	1.176.453.918	34,92	1.392.898.918	42,31	11,47	34,92	128.061.561.386	34,92	46,17	Bidang SDA
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	3	Dok	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
2	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	43	Unit	31.100.000.000	18	6.254.974.260	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	18	6.254.974.260	41,86	20,11	
3	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	9	Titik	15.000.000.000	164	15.792.254.359	5	846.000.000	0	-	0	28.560.000	0	28.560.000	0,00	3,38	164	15.820.814.359	1822,22	105,47	
4	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	51,33	Km	197.450.000.000	23,46	97.258.550.849	0,50	2.396.000.000	0	-	0,28	611.774.118	0,28	611.774.118	56,00	25,53	23,74	97.870.324.967	46,25	49,57	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Kabupaten)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Capaian Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Triwulan I		Triwulan II											
									K	Rp	K	Rp										K
5	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	2	Unit	4.800.000.000	0	-	2	5.900.000.000	0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
6	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	50	Km	5.460.000.000	29,74	4.984.142.000	10	1.000.000.000	5,70	216.445.000	2,90	536.119.800	8,60	752.564.800	86,00	75,26	38,34	5.736.706.800	76,68	105,07	
7	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	11	Unit	22.000.000.000	3	2.188.516.000	1	2.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	3	2.188.516.000	27,27	9,95	
8	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	75	Orang	1.250.000.000	3	190.225.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	3	190.225.000	4,00	15,22	
Rata-rata capaian kinerja (%)															17,75	13,02			252,29	38,17		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															17,75	13,02			252,29	38,17		

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Irigasi dan Konservasi Sumber Daya Air
 Indikator/Target : Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi

Lembar : 3

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Kabupaten)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Capaian Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Triwulan I		Triwulan II											
									K	Rp	K	Rp										K
	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi	88,04	%	240.715.986.000	82,70	188.437.190.149	84,40	5.200.000.000	0	220.335.000	0,18	256.915.000	82,88	477.250.000	98,20	9,18	82,88	188.914.440.149	94,14	78,48	Bidang SDA
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	13	Dok	1.300.000.000	1	90.964.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	1	90.964.000	7,69	7,00	
2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2	Km	5.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	97	Km	203.875.986.000	140,99	171.801.314.849	0,187	200.000.000	0	-	2,40	23.520.000	2,40	23.520.000	12,83	11,76	143,39	171.824.834.849	147,82	84,28	
4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	105	Km	30.540.000.000	105	16.544.911.300	105	5.000.000.000	6,50	220.335.000	5,50	233.395.000	12,00	453.730.000	11,43	9,07	117	16.998.641.300	111,43	55,66	
Rata-rata capaian kinerja (%)															6,07	5,21			66,74	36,73		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															6,07	5,21			66,74	36,73		

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 Indikator/Target : Cakupan Air Minum Layak

Lembar : 4

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Kabupaten)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Capaian Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan I		Triwulan II		K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Air Minum Layak	90,74 %	207.830.358.000	88,51	70.918.974.140	90,04	9.446.000.000	0	25.570.000	0,01	280.691.600	88,52	306.261.600	98,31	3,24	88,52	71.225.235.740	97,55	34,27	Bidang AMPLP
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang Disusun	10 Dok	1.050.000.000	4	396.550.900	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00	4	396.550.900	40,00	37,77	
2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah rumah tangga terlayani/ terpasang jaringan perpipaan	14700 SR	62.500.000.000	0	-	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	-	-	
3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	17142 SR	110.200.000.000	16397	49.656.975.640	1612	7.446.000.000	0	16.070.000	55	271.901.200	55	287.971.200	3,41	3,87	16452	49.944.946.840	95,97	45,32	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Kabupaten)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Capaian Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Triwulan I		Triwulan II											
									K	Rp	K	Rp										K
4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	8750	SR	21.080.358.000	2385	7.687.267.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	2385	7.687.267.000	27,26	36,47	
5	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	5	Klpk	1.000.000.000	10	1.601.693.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	10	1.601.693.000	200,00	160,17	
6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Kegiatan Perluasan SPAM	3750	SR	12.000.000.000	2575	11.576.487.600	970	2.000.000.000	0	9.500.000	0	8.790.400	0	18.290.400	0,00	0,91	2575	11.594.778.000	68,67	96,62	
Rata-rata capaian kinerja (%)															0,57	0,80			71,98	62,72		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															0,57	0,80			71,98	62,72		

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 Indikator/Target : Cakupan Sanitasi Layak

Lembar : 6

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Kabupaten)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Capaian Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan I		Triwulan II		K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Sanitasi Layak	68,53	%	144.000.000.000	67,69	32.964.215.916	68,11	7.701.000.000	0	-	0	19.119.200	67,69	19.119.200	99,38	0,25	67,69	32.983.335.116	98,77	22,91	Bidang AMPLP
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	16	Dok	1.600.000.000	1	99.706.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	1	99.706.500	6,25	6,23	
2	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik	12430	Rumah Tangga	102.400.000.000	6283	17.942.981.416	1168	7.701.000.000	0	-	0	19.119.200	0	19.119.200	0,00	0,25	6283	17.962.100.616	50,55	17,54	
3	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3000	Rumah Tangga	40.000.000.000	2650	14.921.528.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	2650	14.921.528.000	88,33	37,30	
Rata-rata capaian kinerja (%)															0,00	0,08			48,38	20,36		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															0,00	0,08			48,38	20,36		

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 Indikator/Target : Persentase Penurunan Luas Genangan Air

Lembar : 7

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Kabupaten)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Capaian Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Triwulan I		Triwulan II											
									K	Rp	K	Rp										K
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Penurunan Luas Genangan Air	0	%	177.787.960.000	60	52.089.655.383	25	3.790.000.000	0	-	0	557.578.995	60	557.578.995	41,67	14,71	60	52.647.234.378	60,00	29,61	Bidang SDA
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	4	Dok	400.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
2	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang Disusun	2	Dok	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
3	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	33500	M	93.000.000.000	7,814	33.925.736.383	920	2.000.000.000	0	-	111,70	533.498.995	111,7	533.498.995	0,00	26,67	119,51	34.459.235.378	0,36	37,05	
4	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	95120	M	84.187.960.000	18,61	18.163.919.000	1575	1.790.000.000	0	-	2977	24.080.000	2977	24.080.000	189,02	1,35	2995,6	18.187.999.000	3,15	21,60	
Rata-rata capaian kinerja (%)																47,25	7,01			0,88	14,66	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																47,25	7,01			0,88	14,66	

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung
 Indikator/Target : Persentase Bangunan Gedung yang Layak Teknis dan Fungsi

Lembar : 8

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Kabupaten)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Capaian Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan I		Triwulan II		K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp	K	Rp										
	Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Teknis dan Fungsi	9,98	%	280.475.000.000	9,52	102.385.866.151	9,45	69.150.000.000	0	57.715.500	0	86.370.000	9,52	144.085.500	100,74	0,21	9,52	102.529.951.651	95,39	36,56	Bidang Bangunan
1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	515	Dok	3.225.000.000	1888	281.694.000	105	500.000.000	7	45.850.000	10	49.350.000	17	95.200.000	16,19	19,04	1905	376.894.000	369,90	11,69	
2	Perencanaan, Pembangunan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	37	Dok	275.500.000.000	32	101.924.586.151	6	68.500.000.000	0	-	0	27.420.000	0	27.420.000	0,00	0,04	32	101.952.006.151	86,49	37,01	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Kabupaten)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Capaian Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Triwulan I		Triwulan II											
									K	Rp	K	Rp										K
3	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	50	Dok	1.150.000.000	82	135.096.000	100	100.000.000	36	11.865.500	30	9.600.000	66	21.465.500	66,00	21,47	148	156.561.500	296,00	13,61	
4	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	3	Dok	600.000.000	1	44.490.000	1	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	1	44.490.000	33,33	7,42	
Rata-rata capaian kinerja (%)															20,55	10,14			196,43	17,43		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															20,55	10,14			196,43	17,43		

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Bangunan dan Lingkungan
 Indikator/Target : Persentase Luas Bangunan dan Lingkungan yang Tertata

Lembar : 10

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Kabupaten)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Capaian Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Triwulan I		Triwulan II											
									K	Rp	K	Rp										K
	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Luas Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	30	%	126.200.000.000	32,48	21.785.094.147	20	18.488.600.000	0	28.810.000	0	25.890.000	32,48	54.700.000	162,40	0,30	32,48	21.839.794.147	108,27	17,31	Bidang Bangunan
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	3	Dok	600.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	0	-	0,00	0,00		
2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	6	Kawasan	125.000.000.000	2	21.785.094.147	4	18.488.600.000	0	28.810.000	0	25.890.000	0	54.700.000	0,00	0,30	2	21.839.794.147	33,33	17,47	
3	Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	3	Dok	600.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)															0,00	0,10			11,11	5,82		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															0,00	0,10			11,11	5,82		

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan
 Indikator/Target : Persentase Kemantapan Jalan

Lembar : 11

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Kabupaten)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Capaian Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan I		Triwulan II		K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	57,92	%	2.056.099.667.400	51,42	679.182.429.114	55,27	289.387.720.200	0	9.898.959.490	0	12.336.443.063	51,42	22.235.402.553	93,03	7,68	51,42	701.417.831.667	88,78	34,11	Bidang Bina Marga
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan dan Pengendalian	112	Dok	11.578.187.500	61	6.283.667.700	7	728.606.200	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	61	6.283.667.700	54,46	54,27	
2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	540000	M2	276.012.400.000	41826	15.350.635.095	48511	61.900.000.000	0	16.940.000	0	111.141.000	0	128.081.000	0,00	0,21	41826	15.478.716.095	7,75	5,61	
3	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	116	Km	374.410.300.000	27,3	59.265.886.790	44,57	39.860.000.000	0	1.090.000	0	265.753.000	0	266.843.000	0,00	0,67	27,30	59.532.729.790	23,49	15,90	
4	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	549	Km	813.583.650.000	241,06	362.179.999.922	89,25	104.034.400.000	0	3.705.000	1,60	4.948.371.000	2	4.952.076.000	1,79	4,76	242,66	367.132.075.922	44,19	45,13	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Kabupaten)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Capaian Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Triwulan I		Triwulan II											
									K	Rp	K	Rp										K
5	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	124	Km	127.176.000.000	20,19	125.187.903.032	26,27	17.000.000.000	7,50	8.245.219.000	3,68	5.105.706.213	11,18	13.350.925.213	42,56	78,53	31,37	138.538.828.245	25,40	108,93	
6	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	829	Km	94.688.850.000	615,5	44.546.029.600	590	17.000.000.000	25	1.624.452.990	20	1.740.358.800	45	3.364.811.790	7,63	19,79	660,5	47.910.841.390	79,67	50,60	
7	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	3000	M	278.900.000.000	2,74	51.216.455.550	3085,66	46.264.714.000	0	1.295.000	0	-	0	1.295.000	0,00	0,00	2,74	51.217.750.550	0,09	18,36	
8	Pembangunan Flyover	Panjang Flyover yang Dibangun	500	M	6.750.025.300	500	5.755.616.825	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	500	5.755.616.825	100,00	85,27	
9	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	1425	Km	60.630.000.000	180	3.276.728.000	0	-	0	635.000	0	-	0	635.000	0,00	0,00	180	3.277.363.000	12,63	5,41	
10	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	860	M	3.748.403.600	936	2.098.479.800	194	900.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	936	2.098.479.800	108,84	55,98	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Kabupaten)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Capaian Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Triwulan I		Triwulan II											
									K	Rp	K	Rp										K
11	Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	10,15	Km	7.821.851.000	3,504	3.938.226.800	7,75	1.500.000.000	0	5.622.500	0,08	165.113.050	0,08	170.735.550	1,03	11,38	3,584	4.108.962.350	35,31	52,53	
12	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4	Dok	400.000.000	1	54.000.000	1	100.000.000	0	-			0	-	0,00	0,00	1	54.000.000	25,00	13,50	
13	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4	Dok	400.000.000	1	28.800.000	1	100.000.000	0	-			0	-	0,00	0,00	1	28.800.000	25,00	7,20	
Rata-rata capaian kinerja (%)															4,08	8,87			41,68	39,90		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															4,08	8,87			41,68	39,90		

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 Indikator/Target : Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Bersertifikat

Lembar : 14

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Kabupaten)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Capaian Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Triwulan I		Triwulan II										
									K	Rp	K	Rp									
	Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Bersertifikat	31,04 %	6.600.000.000	23,73	1.677.570.800	27,24	1.800.000.000	0	51.990.250	2,11	193.990.800	25,84	245.981.050	94,86	13,67	49,57	1.923.551.850	159,70	29,14	Bidang Jasa Konstruksi
1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	640 Orang	1.200.000.000	380	436.239.000	60	400.000.000	40	48.190.300	26	98.376.800	66	146.567.100	110,00	36,64	446	582.806.100	69,69	48,57	
2	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	340 Orang	1.200.000.000	369	280.502.550	60	350.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	369	280.502.550	108,53	23,38	
3	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	4 Dok	1.400.000.000	1	199.778.000	1	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	1	199.778.000	25,00	14,27	
4	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	10 Dok	1.000.000.000	7	596.256.250	2	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	7	596.256.250	70,00	59,63	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Kabupaten)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Capaian Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Triwulan I		Triwulan II											
									K	Rp	K	Rp										K
5	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	8	Dok	1.200.000.000	2	164.795.000	4	450.000.000	0	3.799.950	1	95.614.000	1	99.413.950	25,00	0,00	3	264.208.950	37,50	22,02	
6	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	6	Dok	600.000.000	0	-	3	250.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)															22,50	6,11			51,79	27,98		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															22,50	6,11			51,79	27,98		

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 Indikator/Target : Persentase Proyek Tanpa Kecelakaan Konstruksi

Lembar : 16

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Kabupaten)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Capaian Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan I		Triwulan II		K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Proyek Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100	%	1.300.000.000	100	545.097.800	100	200.000.000	0	-	0	40.730.000	100	40.730.000	100,00	20,37	100	585.827.800	100,00	45,06	Bidang Jasa Konstruksi
1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	5	Lap	1.300.000.000	3	545.097.800	1	200.000.000	0	-	0	40.730.000	0	40.730.000	0,00	20,37	3	585.827.800	60,00	45,06	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00	20,37			60,00	45,06	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																0,00	20,37			60,00	45,06	

Sasaran : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Tata Ruang
 Indikator/Target : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang

Lembar : 17

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Kabupaten)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Capaian Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan I		Triwulan II		K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang	84,50	%	23.795.000.000	83,50	9.006.551.060	84	1.996.000.000	0	31.210.000	0,20	51.213.900	83,70	82.423.900	99,64	4,13	83,70	9.088.974.960	99,05	38,20	Bidang Penataan Ruang
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	41	Dok	17.400.000.000	21	6.691.750.560	2	836.500.000	0	16.220.000	0	22.080.000	0	38.300.000	0,00	4,58	21	6.730.050.560	51,22	38,68	
2	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/ Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota	29	Dok	2.450.000.000	3	1.103.343.000	1	386.500.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	3	1.103.343.000	10,34	45,03	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	5	Dok	2.000.000.000	3	531.496.000	1	386.500.000	0	8.400.000	0	15.200.000	0	23.600.000	0,00	6,11	3	555.096.000	60,00	27,75	
4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5	Dok	1.945.000.000	4	679.961.500	1	386.500.000	0	6.590.000	0	13.933.900	0	20.523.900	0,00	5,31	4	700.485.400	80,00	36,01	
Rata-rata capaian kinerja (%)															0,00	4,00			50,39	36,87		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															0,00	4,00			50,39	36,87		

Sumber : Renstra Dinas PUPR Tahun 2019-2024 dan Laporan Triwulan II Tahun 2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Penataan Ruang, Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, Jasa Konstruksi dan Bangunan. Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mempertegas peran dan fungsi dinas dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Garut.

Secara umum pelaksanaan pembangunan dibidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Penataan Ruang, Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, Jasa Konstruksi dan Bangunan yang dilaksanakan pada periode sebelumnya telah mencapai kemajuan, hal ini dapat ditunjukkan dengan perkembangan indikator makro pembangunan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi termasuk sinergitas dan koordinasi pembangunan antar SKPD, antar Kabupaten/Kota dan dengan Pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Dalam perkembangan ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan responsif, kreatif dan inovatif sehingga mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mengukur seberapa besar keberhasilan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya pada tingkat pelayanan, maka diperlukan adanya analisis kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digunakan beberapa indikator dengan sasaran target sesuai dengan Renstra.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Renstra, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Garut

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Tampung Air yang Tersedia	-	-	30,16%	57,14%	82,54%	100,00%	23,81%	34,92%	38,10%	47,62%	Tahun 2023 di proyeksikan tampungan terbangun hanya sebanyak 2 unit
2	Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi	-	88,04%	76,83%	80,70%	84,40%	88,04%	81,89%	82,70%	84,40%	88,04%	Target tercapai karena pada tahun terdahulu capaian melebihi target
3	Cakupan Air Minum Layak	100%	90,74%	88,74%	89,27%	90,04%	90,74%	86,96%	88,51%	89,10%	90,74%	Pencapaian target sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk
4	Cakupan Sanitasi Layak	100%	68,53%	67,27%	67,69%	68,11%	68,53%	67,20%	67,69%	68,11%	68,53%	Target tercapai dengan adanya peran aktif masyarakat dalam program STBM
5	Persentase Penurunan Luas Genangan Air	-	0,00%	60,00%	50,00%	25,00%	0,00%	70,00%	60,00%	50,00%	35,50%	Kawasan terbangun belum optimal dalam pengendalian <i>run off</i> sehingga genangan masih akan terjadi

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Teknis dan Fungsi	-	-	8,40%	8,92%	9,45%	9,98%	8,40%	9,52%	9,75%	9,98%	Target tercapai karena pada tahun terdahulu capaian melebihi target
7	Persentase Luas Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	-	-	6,00%	12,00%	20,00%	30,00%	6,00%	32,48%	38,80%	40,00%	Target tercapai karena pada tahun terdahulu capaian melebihi target
8	Persentase Kemantapan Jalan	-	57,92%	49,95%	52,61%	55,27%	57,92%	49,92%	51,42%	55,00%	57,50%	Target tidak tercapai dengan analisa bahwa trand bencana alam dan tingkat kerusakan jalan yang masih tinggi
9	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Bersertifikat	-	-	19,64%	23,44%	27,24%	31,04%	19,64%	23,73%	28,10%	31,04%	
10	Persentase Proyek Tanpa Kecelakaan Konstruksi	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	-	-	83,00%	83,50%	84,00%	84,50%	83,00%	83,50%	84,00%	84,50%	
12	Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	-	-	53,00%				48,80%				

Sumber : Renstra Dinas PUPR Tahun 2019-2024 dan Laporan Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021 dan 2022

Tabel 2.3
Realisasi Kinerja Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)		Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	2021	2022
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.757.456.280	28.495.753.522	27.292.394.060	26.049.277.075	91,72%	91,41%
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	56.230.390.016,29	151.505.858.449	52.832.222.581	145.886.098.617	93,96%	96,29%
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	26.447.665.000	26.409.985.504	26.149.140.600	26.233.609.540	98,87%	99,33%
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	11.726.293.500	9.200.422.000	11.720.949.800	9.186.649.800	99,95%	99,85%
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6.456.600.227,55	19.714.272.171,80	6.330.765.838	19.254.359.795	98,05%	97,67%
6	Program Pengembangan Permukiman	24.953.485.204	-	24.891.067.040	-	99,75%	-
7	Program Penataan Bangunan Gedung	55.601.180.100	43.743.906.845	52.149.480.414	43.718.504.151	93,79%	99,94%

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)		Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	2021	2022
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	11.341.974.160	10.792.285.364	11.284.628.350	10.500.466.147	99,49%	97,30%
9	Program Penyelenggaraan Jalan	210.456.264.462,37	320.731.547.554	203.937.837.865	307.170.391.114	96,90%	95,77%
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.200.000.000	624.624.000	1.185.068.000	623.551.600	98,76%	99,83%
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.601.348.038	2.820.634.560	4.309.917.200	2.540.871.060	93,67%	90,08%
Jumlah		438.772.656.988,21	614.039.289.969,80	422.083.471.748	591.163.778.899	96,20%	96,27%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas PUPR Tahun 2021 dan Tahun 2022

Pelayanan umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut adalah menciptakan kondisi sarana dan prasarana infrastruktur yang baik melalui pengelolaan pelayanan yang prima, sehingga aktivitas personal maupun bersama dalam proses kegiatan perekonomian, pariwisata, pendidikan, sosial, budaya dan kegiatan lainnya dapat berlangsung dengan baik sesuai kewajaran-kewajaran kemanusiaan, termasuk sarana prasarana lingkungan permukiman. Sebagai institusi bidang teknis yang tugasnya menunjang kegiatan lainnya, maka dampak yang akan ditimbulkan akan negatif apabila kondisi sarana dan prasarana tidak baik. Bentuk-bentuk pelayanan umum yang dimaksud antara lain berupa penyediaan jalan, jembatan, saluran drainase, pengendalian banjir, penyediaan air baku, saluran irigasi, sarana air minum, sanitasi, bangunan dan fasilitas umum.

a. Jaringan Jalan

Tingkat kemantapan jalan (jalan kabupaten dan jalan desa) pada tahun 2022 mengalami peningkatan sepanjang 58,57 km dari 1.947,84 km pada tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian tahun 2022, kemantapan jalan mencapai 51,42% dari target sebesar 52,61% dengan tingkat capaian sebesar 97,74%.

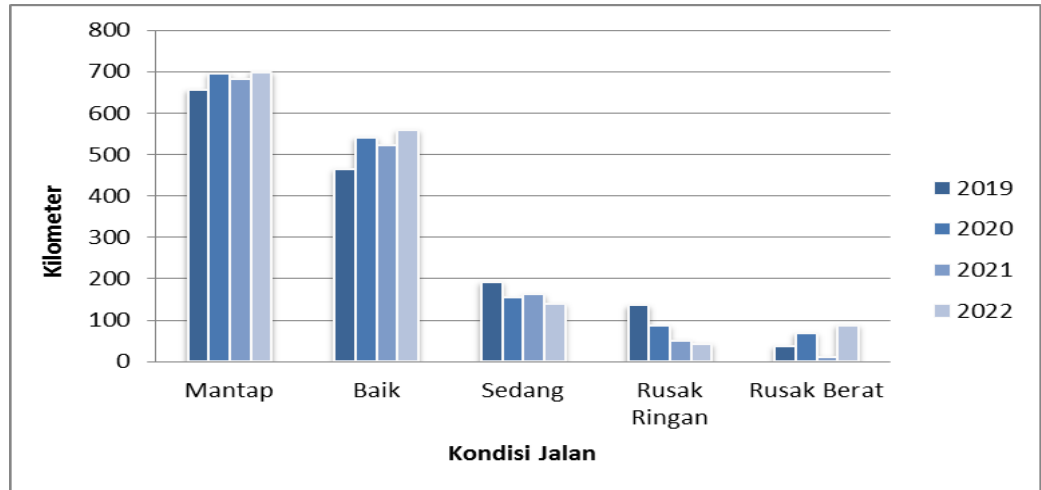
Kondisi mantap jalan kabupaten pada tahun 2022 mengalami peningkatan sepanjang 41,88 km (5,05%) dibandingkan dengan kondisi mantap jalan kabupaten pada tahun 2019 sepanjang 656,66 km atau sebesar 79,21%. Tingkat kemantapan jalan kabupaten sampai dengan tahun 2022 sebesar 84,26%.

Tabel 2.4
Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2019- 2022

No	Kondisi	Panjang (Km)			
		2019	2020	2021	2022
1	Mantap (baik+sedang)	656,66	695,68	682,63	698,54
2	Baik	464,61	541,62	520,75	558,88
3	Sedang	192,05	154,06	161,88	139,66
4	Rusak Ringan	135,32	86,61	51,17	42,8
5	Rusak Berat	37,02	68,43	11,48	87,66
Total		829,00	829,00	829,00	829,00

Sumber: Bidang Bina Marga Dinas PUPR

Grafik 1.1
Kondisi Jalan Kabupaten 2019-2022



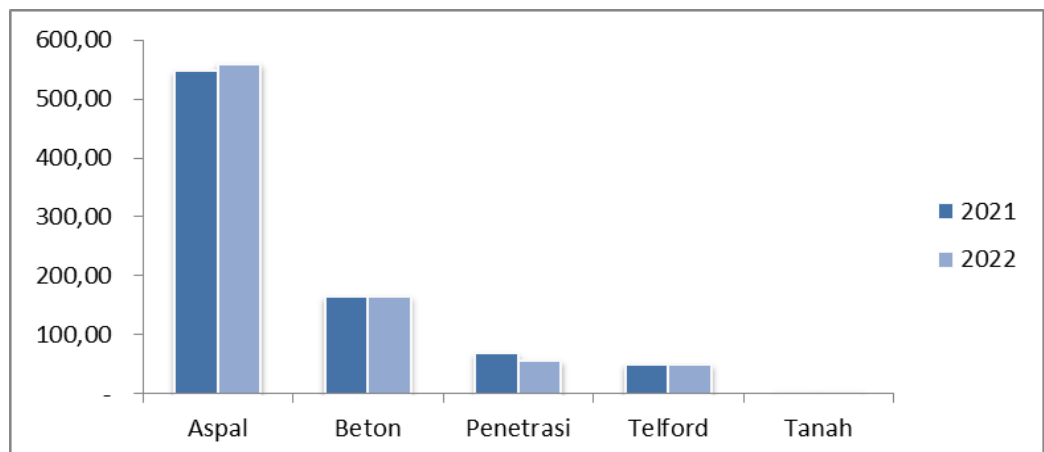
Tipe permukaan jalan kabupaten sampai dengan tahun 2022, meliputi Aspal (AC, HRS, ATB) sepanjang 559,13 km (67,45%), Beton sepanjang 164,64 km (11,36%), Lapis Penetrasi/Latasir/Macadam sepanjang 55,76 km (6,73%), Telford/Kerikil sepanjang 49,21 km (5,94%) dan Tanah/Belum Tembus sepanjang 0,26 km (0,03%).

Tabel 2.5
Tipe Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 2021- 2022

No	Tipe Permukaan	Panjang (Km)	
		2021	2022
1	Aspal (AC, HRS, ATB)	546,86	559,13
2	Beton	163,87	164,64
3	Penetrasi/Latasir/Macadam	68,29	55,76
4	Telford/Kerikil	49,72	49,21
5	Tanah/Belum Tembus	0,26	0,26

Sumber: Bidang Bina Marga Dinas PUPR

Grafik 1.2
Tipe Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 2021- 2022



b. Sumber Daya Air

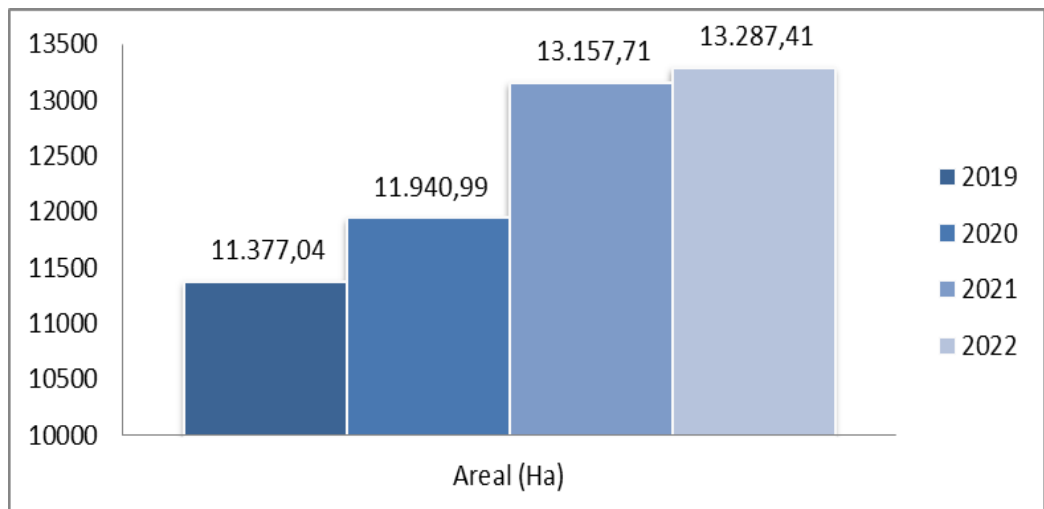
Pada aspek infrastruktur jaringan irigasi, pembangunan difokuskan dalam upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah Irigasi Teknis yang menjadi kewenangan pemerintah seluas 16.067 Ha dengan jumlah bangunan bendung utama 38 buah, bangunan air pelengkap 1.694 buah, saluran primer 174,02 km, saluran sekunder 51,96 km dan saluran tersier 3,50 km. Saluran irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2022 sebesar 57,98% meliputi saluran primer 102,75 km (59,04%), saluran sekunder 28,40 km (54,66%) dan saluran tersier 1,89 km (54,09%). Luas areal terlayani sampai dengan tahun 2022 sebesar 82,70% (13.287,41 ha) mengalami peningkatan seluas 129,70 ha dibandingkan tahun 2021 seluas 13.157,71 ha (81,89%).

Tabel 2.6
Luas Areal Terlayani Irigasi Teknis Tahun 2019-2022

No	Uraian	Luas Areal (Ha)			
		2019	2020	2021	2022
1	Areal terlayani jaringan Irigasi Teknis (38 Daerah Irigasi)	11.377,04	11.940,99	13.157,71	13.287,41

Sumber: Bidang SDA Dinas PUPR

Grafik 1.3
Luas Areal Terlayani Irigasi Teknis Tahun 2019-2022



c. Air Minum dan Sanitasi

Pencapaian kinerja cakupan air minum layak pada tahun 2022 sebesar 88,51% mengalami peningkatan 1,55% dari tahun 2021 yang mencapai 86,96%. Jumlah jiwa yang terlayani sampai tahun 2022 bertambah sebanyak 255.675 jiwa dibandingkan tahun 2021 dengan jumlah terlayani sebanyak 2.186.750 jiwa.

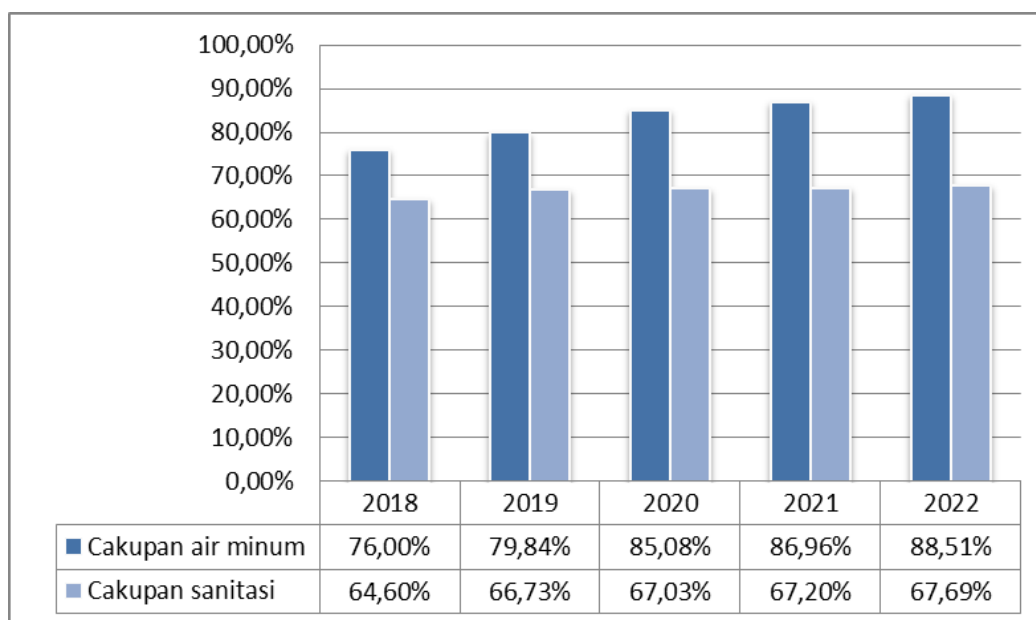
Pencapaian kinerja cakupan sanitasi layak pada tahun 2022 sebesar 67,69% mengalami peningkatan 0,49% dari tahun 2021 yang mencapai 67,20%. Jumlah rumah tangga yang terlayani sampai tahun 2022 bertambah sebanyak 44.101 rumah tangga dibandingkan tahun 2021 dengan jumlah terlayani sebanyak 575.484 rumah tangga.

Tabel 2.7
Kinerja Cakupan Air Minum dan Sanitasi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan air minum layak	76%	79,84%	85,08%	86,96%	88,51%
2	Cakupan sanitasi layak	64,60%	66,73%	67,03%	67,20%	67,69%

Sumber: Bidang AMPLP Dinas PUPR

Grafik 1.4
Kinerja Cakupan Air Minum dan Sanitasi Tahun 2018-2022



d. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar untuk SPM Pekerjaan Umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Bupati Garut Nomor 150 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima dan *excellent*, maka Pemerintah Kabupaten Garut menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sampai dengan tahun 2022 sebesar 87,02% mengalami peningkatan 0,05% dari tahun 2021 yang mencapai 86,97%.

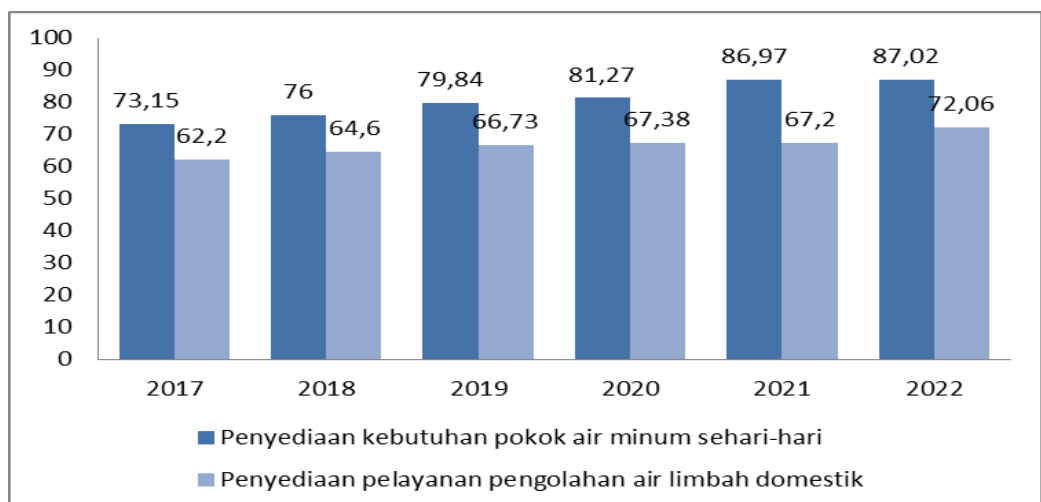
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sampai dengan tahun 2022 sebesar 72,05% mengalami peningkatan 4,86% dari tahun 2021 yang mencapai 67,20%.

Tabel 2.8
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2017-2022

Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target (%)	Realisasi (%)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	73,15	76,00	79,84	81,27	86,97	87,02
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	62,20	64,60	66,73	67,38	67,20	72,06

Sumber: Bidang AMPLP Dinas PUPR

Grafik 1.5
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2017-2022



Tabel 2.9
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
s/d Triwulan II Tahun 2023

Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target Nasional	Target Akhir Periode Renstra (2024)	Target Tahun 2023	Realisasi s/d TW II Tahun 2023
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100%	100%	100%	88,52%
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	72,06%

Sumber : Laporan SPM Dinas PUPR Triwulan II Tahun 2023

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Visi Pembangunan Kabupaten Garut periode 2019-2024 adalah “**Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**”. Rumusan visi ini mengandung tiga makna pokok visi di dalamnya yakni bertaqwa, maju dan sejahtera. Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut:

Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan mengacu rumusan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. Hasil rumusan rancangan teknokratik misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat Misi Kabupaten Garut tersebut di atas, maka misi Ketiga menjadi misi yang menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Misi tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya pencapaian prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dari empat Misi RPJMD, terdapat Tujuan dan Sasaran beserta indikator sasaran yang akan dicapai sebagai *impact* penyelenggaraan Pembangunan Daerah Periode 2019-2024. Pada upaya pencapaian tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran:

Tujuan : Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas.

- Sasaran:
1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian;
 2. Meningkatnya pemenuhan akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 3. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir.

Tujuan : Terwujudnya Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari dan Berkelanjutan.

- Sasaran:
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
 2. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana.

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut di atas dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur dengan pembangunan infrastruktur transportasi berupa jalan dan jembatan, peningkatan layanan terhadap akses pusat-pusat pertumbuhan baru serta daerah terisolir, infrastruktur sumber daya air dan irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, bangunan gedung, dan layanan jasa konstruksi.

Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mengemban fungsi untuk pencapaian program nasional dan internasional seperti pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), arah pengembangan wilayah/penataan ruang serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/*SDGs*).

Isu strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, maka pelaksanaan program dan kegiatan diprioritaskan sebagai berikut:

1. Tingkat Kemantapan Jalan

Penanganan jalan yang dilaksanakan diprioritaskan untuk membuka akses dan membangun jalan untuk daerah-daerah yang terisolir dan antar kecamatan di Kabupaten Garut serta meningkatkan kemantapan jalan kabupaten dan desa. Pengalokasian anggaran yang cukup signifikan meningkatkan capaian kemantapan jalan dari 51,42% pada Tahun 2022 menjadi 55,27% pada Tahun 2023. Hal ini masih membutuhkan optimalisasi peningkatan penanganan mengingat target provinsi 82,78%, target RPJMD sebesar 57,92%.

2. Infrastruktur Irigasi dan Sumber Daya Air

Potensi air belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencukupi kebutuhan air baku untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan maupun penyediaan air bersih untuk air minum, penanganan sumber air dari hulu sampai dengan hilir serta upaya konservasi dan pendayagunaan air, sehingga perlu kesadaran dan partisipasi masyarakat pelaku pengguna air langsung dan tidak langsung dalam menjamin keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air. Hingga saat ini, capaian areal yang terlayani jaringan irigasi sebesar 82,88%, sedangkan capaian tampungan air yang tersedia sebesar 34,92% masih jauh dari target sebesar 82,54%.

3. Pencapaian SPM Air Minum

Pencapaian SPM Air minum sampai dengan tahun 2022 sebesar 88,51% mengalami peningkatan sebesar 1,55% dari Tahun 2021 dengan capaian sebesar 86,96%. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tetapi masih jauh dari target *universal acces* sebesar 100%. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan penguatan peran serta seluruh pihak dalam pengelolaan dan pengolahan serta konservasi sumber-sumber air minum untuk menjaga keberlangsungan pemenuhan air minum.

- 4. Pencapaian SPM Sanitasi**

Persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Garut saat ini baru mencapai 67,69% masih belum memenuhi SPM sanitasi. Masih diperlukan upaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan. Capaian di atas masih pada tataran akses dasar, sedangkan akses layak masih rendah sehingga membutuhkan peningkatan peran serta seluruh pihak dan dukungan anggaran dari berbagai sumber mengingat capaian masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan target *universal acces* sebesar 100%.
- 5. Ketersediaan Bangunan/Gedung yang Layak Teknis**

Pembangunan gedung/bangunan yang layak teknis menjadi prioritas dalam periode ini. Capaian gedung yang layak teknis sampai saat ini baru mencapai 8,40%, masih jauh dari jumlah bangunan/gedung yang terdapat di Kabupaten Garut. Masih terdapat fasilitas perkantoran dan sarana umum yang belum selesai dan berfungsi. Upaya untuk mengoptimalkan capaian kinerja diperlukan peran serta pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk pemenuhan syarat-syarat dalam pembangunan gedung antara lain PBG dan SLF.
- 6. Layanan Jasa Konstruksi**

Dukungan dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat sesuai peran dan fungsinya masing-masing khususnya dari kalangan pelaku usaha dibidang jasa konstruksi/konsultasi sesuai Permen PUPR Nomor 17 Tahun 2019. Peningkatan kompetensi, profesionalitas, dan produktifitas tenaga kerja konstruksi menjadi prioritas yang dilaksanakan dari tahun sebelumnya dan beberapa tahun mendatang, khususnya pada pelaksanaan konstruksi yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Garut.
- 7. Ketaatan Pemanfaatan Ruang**

Optimalisasi pemanfaatan ruang untuk pembangunan, rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang seharusnya menurut peraturan perundangan minimal sebesar 20% dan masih tingginya laju perubahan alih fungsi lahan, serta kurang taatnya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena berbagai kepentingan, menyebabkan terjadinya pelanggaran tata ruang. Masih dibutuhkan upaya yang lebih optimal untuk menjadikan Rencana Tata Ruang sebagai dasar/pedoman pemanfaatan ruang.
- 8. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Nilai SAKIP menunjukkan keberhasilan suatu instansi dalam pencapaian kinerjanya, sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada para *stakeholders*/pemangku kepentingan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun nilai SAKIP Tahun 2022 telah mendapat nilai A, tetapi masih terdapat kekurangan-kekurangan dan catatan yang perlu diperbaiki.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi antara lain:

1. Kemantapan jalan belum mencapai target. Rendahnya kemantapan jalan terjadi oleh beberapa hal, antara lain:
 - a. belum optimalnya pemeliharaan jalan dan kelengkapan jalan seperti drainase;
 - b. rendahnya kualitas konstruksi;
 - c. belum fungsionalnya jalan-jalan baru;
 - d. masih terbatasnya kapasitas jalan menuju destinasi wisata;
 - e. masih terbatasnya kapasitas jalan menuju kawasan sentra pertanian;
 - f. masih terbatasnya kapasitas jalan menuju kawasan sentra ekonomi produktif lainnya.

2. Masih rendahnya dukungan sektor irigasi terhadap peningkatan produksi pertanian. dampak dan dukungan sektor irigasi terhadap peningkatan produksi pertanian masih rendah, terjadi oleh beberapa hal, antara lain:
 - a. belum optimalnya upaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten;
 - b. belum optimalnya rehabilitasi jaringan irigasi kabupaten, terutama dalam menentukan lokasi prioritas;
 - c. pengendalian ruang dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

3. Tingkat akses air minum belum mencapai target. Tingkat capaian akses air minum masih rendah dibandingkan dengan target *universal acces* sebesar 100%, terjadi oleh beberapa hal, antara lain:
 - a. pengelolaan pasca pembangunan tidak optimal, bahkan dalam beberapa kasus tidak dilakukan;
 - b. belum dilakukan potensi menjalin kerjasama dengan non pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Tingginya ketergantungan terhadap pembiayaan pemerintah menyebabkan tidak optimalnya kualitas pembangunan maupun kuantitas sumber air minum dan sanitasi;
 - c. belum optimalnya upaya perlindungan terhadap sumber air untuk kebutuhan air baku;
 - d. belum optimalnya kinerja kelembagaan pengelolaan air minum. baik segi sumber daya manusia maupun keandalan suatu kelembagaan tersebut;
 - e. belum memiliki lokasi prioritas dalam rencana pembangunan. Ada kalanya masih dilakukan *by project* tanpa dilakukan studi awal yang matang disesuaikan dengan kondisi lahan dan keterkaitan dengan sektor lainnya;
 - f. masih rendahnya kualitas air baku dan tidak meratanya kuantitas dan ketersediaan air baku.

4. Tingkat akses sanitasi belum mencapai target. Tingkat capaian akses sanitasi masih rendah dibandingkan dengan target *universal acces* sebesar 100%, terjadi oleh beberapa hal, antara lain:
 - a. masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengelolaan air limbah;
 - b. belum berorientasi pada pengelolaan limbah skala kawasan;
 - c. angka BABS masih tinggi;
 - d. belum ada regulasi pengelolaan air limbah di tingkat kabupaten;
 - e. belum ada unit kerja khusus untuk pengelolaan air limbah.

5. Meningkatnya lokasi titik genangan dan banjir perkotaan. Mulai pesatnya pembangunan di Kabupaten Garut khususnya wilayahnya perkotaan terkadang tidak diiringi dengan pembangunan ruang terbuka hijau, perbaikan saluran dan pengelolaan persampahan, hal tersebut adakalanya menyebabkan mulai seringnya terjadi banjir perkotaan yang durasinya cukup lama walau curah hujan tidak terlalu tinggi. Selain hal tadi juga disebabkan oleh:
 - a. belum optimalnya sistem drainase perkotaan;
 - b. belum optimalnya upaya mengurangi *run off* pada kawasan terbangun;
 - c. pengendalian ruang dan perizinan bangunan belum optimal dalam mengurangi *run off*.

6. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan. Hal lain yang menyebabkan penataan bangunan dan lingkungan belum optimal yaitu:
 - a. masih banyaknya bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. belum optimalnya penerapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
 - c. masih rendahnya penerapan arsitektural bangunan gedung khas Kabupaten Garut;
 - d. masih rendahnya kualitas bangunan gedung pemerintah, yang akan digunakan sebagai percontohan bangunan gedung yang laik fungsi;
 - e. masih adanya bangunan gedung pemerintah yang belum fungsional.

7. Manajemen pelaksanaan konstruksi masih rendah. Sebagai *quality control* untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Namun hal ini kadang abai dilakukan sehingga terjadi permasalahan seperti gagal lelang, terlambatnya pekerjaan, lemahnya pengawasan di lapangan, sampai rendahnya kualitas pekerjaan yang dapat berakibat berurusan dengan masalah hukum.

8. Pemanfaatan dan pengendalian ruang, antara lain:
 - a. Belum optimalnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. Belum optimalnya fungsi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Garut;
 - c. Belum tersedianya aspek legal (Perda) terkait Dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang;
 - d. Belum adanya SDM Aparatur untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dalam hal ini belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Berdasarkan analisis capaian kinerja pelayanan dan permasalahan, dibandingkan dengan target kinerja RPJMD dan nasional, capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih berada di bawah target, hal ini akan berdampak sangat signifikan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Capaian target kinerja yang harus menjadi fokus utama dalam penyusunan rencana kerja adalah pada bidang infrastruktur jalan, Sumber Daya Air, terutama pada pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi dengan target nasional/*universal acces* sebesar 100%.

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta memperhatikan kondisi serta masukan dari berbagai *stakeholder* terkait, terdapat kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dalam pelaksanaan pelayanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi masukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yaitu:

1. Kekuatan:
 - a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang sudah jelas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
 - b. Jumlah aparatur yang memadai;
 - c. Sarana dan prasarana yang dimiliki.
2. Kelemahan
 - a. Kualitas SDM masih belum merata dan memadai untuk bidang teknik khususnya Bidang Bina Marga dan Bidang Sumber Daya Air;
 - b. Masih lemahnya pelaporan dan evaluasi kinerja;
 - c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan asset;
 - d. Keberadaan data penyelenggaraan urusan belum optimal.

3. Peluang
 - a. Prioritas pembangunan yang terarah pada pembangunan infrastruktur dan pemenuhan layanan dasar (RPJMN, RPJMD, SPM, *SDGs*);
 - b. Pertumbuhan sektor pertanian, UMKM, pariwisata, dan pertambangan;
 - c. Pertumbuhan sektor konstruksi teknologi pelaksanaan konstruksi;
 - d. Berkembangnya teknologi informasi;
 - e. Aspek geopolitik;
 - f. Ketersediaan layanan pengadaan barang dan jasa;
 - g. Ketersediaan tenaga ahli (akademisi/praktisi);
 - h. Potensi sumber-sumber pembiayaan infrastruktur (APBN, DAK, Bantuan Keuangan Provinsi).

4. Ancaman/Tantangan
 - a. Peningkatan kebutuhan atas pangan/komoditas sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan);
 - b. Pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah;
 - c. Kualitas pelaksanaan konstruksi yang masih rendah;
 - d. Cuaca dan kondisi alam;
 - e. Kesiapan lahan dan masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi;
 - f. Penurunan pendapatan daerah;
 - g. Dampak lingkungan akibat pelaksanaan konstruksi;
 - h. Dinamika usulan/permintaan pembangunan infrastruktur daerah.

Hasil analisis perkembangan dan masalah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan memperhatikan perkembangan isu-isu penting yang menjadi catatan strategis untuk ditindaklanjuti, maka rekomendasi yang menjadi pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas antara lain:

1. Peningkatan konektivitas dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi dan peningkatan produktifitas;
2. Pembangunan infrastruktur pada kawasan potensi ekonomi;
3. Peningkatan pengelolaan irigasi untuk peningkatan indeks pertanaman;
4. Optimalisasi program padat karya dan swakelola pengadaan jasa konstruksi dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat;
5. Jaminan kepastian investasi sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
6. Penyediaan pelayanan air minum yang aman dan air limbah yang layak dalam upaya penanganan kemiskinan, stunting, penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
7. Pengurangan risiko bencana dan penanganan pasca bencana;
8. Optimalisasi pelayanan sertifikasi laik fungsi, perizinan dan rekomendasi bangunan; dan
9. Optimalisasi pengendalian kualitas pembangunan melalui pemenuhan sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Review terhadap rancangan perubahan RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait dengan prioritas program, kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan berdasarkan rancangan perubahan RKPD. Hal ini ditujukan untuk menjaga kesesuaian/konsistensi antara Perubahan RKPD dan Perubahan Renja.

Pada pelaksanaan penajaman dan finalisasi Perubahan Renja Tahun 2023, tidak terdapat perubahan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan. Hal ini ditujukan untuk optimalisasi dalam pencapaian kinerja yang direncanakan dan untuk pencapaian target Renstra yang sampai dengan Tahun 2022 dan proyeksi Tahun 2023 target capaiannya masih rendah.

Pagu indikatif yang terdapat pada rancangan Perubahan RKPD sebesar Rp395.260.833.490,00, berdasarkan hasil analisis kebutuhan tidak mengalami perubahan, hal ini ditujukan untuk penyesuaian anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023, serta mempertimbangkan optimalisasi pencapaian target dan rasionalisasi/logis dalam kebutuhan pagu belanja dengan mempertimbangkan penyesuaian anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi, dan sumber-sumber anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil review terhadap rancangan Perubahan RKPD sebagai berikut:

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Lembar : 1 dari 22

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai Evaluasi SAKIP	BB Nilai	26.270.504.673	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai Evaluasi SAKIP	BB Nilai	26.270.504.673	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik Nilai				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik Nilai		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pangaaggaran dan Evaluasi Kinerja Sesuai Ketentuan	100%	9.514.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pangaaggaran dan Evaluasi Kinerja Sesuai Ketentuan	100%	9.514.200	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.801.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.801.400	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.712.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.712.800	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	24.404.934.232	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	24.404.934.232	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2832 OB	24.400.147.832	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2832 OB	24.400.147.832	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4.786.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4.786.400	

No	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	369.432.845	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	369.432.845	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.597.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.597.700	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	126.608.345	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	126.608.345	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	69.642.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	69.642.500	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	33.380.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	33.380.400	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.238.200	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.238.200	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	111.965.700	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	111.965.700	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	30.800.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	30.800.000	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.800.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.800.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	909.098.396	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	909.098.396	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	96.117.160	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	96.117.160	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.938.200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.938.200	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	807.043.036	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	807.043.036	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	546.725.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	546.725.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	125 Unit	121.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	125 Unit	121.250.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	425.475.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	425.475.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi	84,40%	21.846.415.750	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi	84,40%	21.846.415.750	
			Persentase Tampungan Air yang Tersedia	82,54%				Persentase Tampungan Air yang Tersedia	82,54%		
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tampungan Air Baku Yang Dibangun	2 Unit	9.085.098.150	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tampungan Air Baku Yang Dibangun	2 Unit	9.085.098.150	
1	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	2 Unit	398.830.000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	2 Unit	398.830.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	53 Titik	3.831.635.000	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	53 Titik	3.831.635.000	
3	Pembangunan Tanggul Sungai	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,45 Km	2.862.753.150	Pembangunan Tanggul Sungai	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,45 Km	2.862.753.150	
4	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	22,80 Km	1.991.880.000	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	22,80 Km	1.991.880.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Panjang Jaringan Irigasi Yang Dibangun, Direhabilitasi Dan Dioperasikan & Dipelihara	36,51 Km	12.761.317.600	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Panjang Jaringan Irigasi Yang Dibangun, Direhabilitasi Dan Dioperasikan & Dipelihara	36,51 Km	12.761.317.600	
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3 Dokumen	150.000.000	
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	10,21 Km	11.623.762.600	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	10,21 Km	11.623.762.600	
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	26,06 Km	987.555.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	26,06 Km	987.555.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Cakupan Air Minum Layak	90,04%	34.714.442.200	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Cakupan Air Minum Layak	90,04%	34.714.442.200	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Kegiatan SPAM	5944 SR	34.714.442.200	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Kegiatan SPAM	5944 SR	34.714.442.200	
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	2993 SR	23.008.131.200	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	2993 SR	23.008.131.200	
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Kegiatan Perluasan SPAM	3122 SR	11.706.311.000	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Kegiatan Perluasan SPAM	3122 SR	11.706.311.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Cakupan Sanitasi Layak	68,11%	6.965.161.800	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Cakupan Sanitasi Layak	68,11%	6.965.161.800	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Tangga yang Mempunyai Pengolahan Air Limbah Domestik	1115 Rumah Tangga	6.965.161.800	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Tangga yang Mempunyai Pengolahan Air Limbah Domestik	1115 Rumah Tangga	6.965.161.800	
1	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik	660 Rumah Tangga	2.147.595.800	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik	660 Rumah Tangga	2.147.595.800	
2	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	570 Rumah Tangga	4.817.566.000	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	570 Rumah Tangga	4.817.566.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase Penurunan Luas Genangan Air	25%	7.589.167.395	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase Penurunan Luas Genangan Air	25%	7.589.167.395	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Panjang Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Direhab dan Dibangun	12,28 Km	7.589.167.395	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Panjang Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Direhab dan Dibangun	12,28 Km	7.589.167.395	
1	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	111,70 M	533.498.995	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	111,70 M	533.498.995	
2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	12,634 Km	7.055.668.400	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	12,634 Km	7.055.668.400	

No	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Bangunan Gedung yang Layak Teknis Dan Fungsi	9,45%	8.244.067.540	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Bangunan Gedung yang Layak Teknis Dan Fungsi	9,45%	8.244.067.540	
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah Bangunan Gedung yang Memenuhi Klasifikasi Bangunan	105 Unit	8.244.067.540	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah Bangunan Gedung yang Memenuhi Klasifikasi Bangunan	105 Unit	8.244.067.540	
1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	105 Dokumen	217.700.000	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	105 Dokumen	217.700.000	
2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	7.994.067.540	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	7.994.067.540	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	100 Dokumen	32.300.000	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	100 Dokumen	32.300.000	
VII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase Luas Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	20%	4.179.462.217	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase Luas Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	20%	4.179.462.217	
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	4 Kawasan	4.179.462.217	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	4 Kawasan	4.179.462.217	
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	4 Kawasan	4.179.462.217	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	4 Kawasan	4.179.462.217	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VIII	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Kemantapan Jalan	55,27%	282.531.770.915	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Kemantapan Jalan	55,27%	282.531.770.915	
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan yang Dibangun, Direkonstruksi, Direhabilitasi dan Dipelihara	337,05 Km	282.531.770.915	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan yang Dibangun, Direkonstruksi, Direhabilitasi dan Dipelihara	337,05 Km	282.531.770.915	
1	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	82.000 M2	13.108.007.727	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	82.000 M2	13.108.007.727	
2	Pembangunan Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan yang Dibangun	31,79 Km	30.147.658.900	Pembangunan Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan yang Dibangun	31,79 Km	30.147.658.900	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Rekonstruksi Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	147,40 Km	139.481.225.383	Rekonstruksi Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	147,40 Km	139.481.225.383	
4	Rehabilitasi Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	68,08 Km	77.593.579.600	Rehabilitasi Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	68,08 Km	77.593.579.600	
5	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	100 Km	6.946.022.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	100 Km	6.946.022.000	
6	Pembangunan Jembatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jembatan yang Dibangun	974,14 M	11.730.855.295	Pembangunan Jembatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jembatan yang Dibangun	974,14 M	11.730.855.295	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	198,00 M	2.473.755.200	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	198,00 M	2.473.755.200	
8	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	0,26 Km	1.050.666.810	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	0,26 Km	1.050.666.810	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	27,24%	1.545.075.000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	27,24%	1.545.075.000	
			Persentase Proyek Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100%				Persentase Proyek Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100%		
1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan dan Tersertifikasi	293 Orang	1.107.775.000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan dan Tersertifikasi	293 Orang	1.107.775.000	
1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	96 Orang	348.272.500	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	96 Orang	348.272.500	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	42 Orang	174.342.500	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	42 Orang	174.342.500	
3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	155 Orang	585.160.000	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	155 Orang	585.160.000	
2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Data dan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	3 Dokumen	300.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Data dan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	3 Dokumen	300.000.000	
1	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	1 Dokumen	100.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	2 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	2 Dokumen	200.000.000	
3	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan	137.300.000	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan	137.300.000	
1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan	137.300.000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan	137.300.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	84,00%	1.374.766.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	84,00%	1.374.766.000	
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penetapan RTRW dan RRTR	10 Dokumen	1.222.696.400	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penetapan RTRW dan RRTR	10 Dokumen	1.222.696.400	
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	10 Dokumen	1.222.696.400	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	10 Dokumen	1.222.696.400	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	58.925.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	58.925.200	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	58.925.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	58.925.200	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	93.144.400	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	93.144.400	
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	93.144.400	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	93.144.400	
TOTAL					395.260.833.490	TOTAL					395.260.833.490

Sumber : SIPD dan Rentra Dinas PUPR Tahun 2019-2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan setiap daerah menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan ayat (2) Pasal 2, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*. Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan yang *komprensif* dan terintegrasi, penyusunan rencana kerja mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Nasional serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*.

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 bertema **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- PN1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- PN2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- PN3 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- PN4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- PN5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- PN6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- PN7 : Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 sebagai berikut:

- 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) Peningkatan kualitas SMD melalui kesehatan dan pendidikan;
- 3) Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *Decent Job*;
- 4) Mendorong pemulihan dunia usaha;
- 5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 6) Pembangunan rendah karbon transisi energi;
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi;
- 8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat merupakan fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 bertema **“Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”** dengan prioritas pembangunan:

- PP1 : Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
- PP2 : Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
- PP3 : Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
- PP4 : Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
- PP5 : Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
- PP6 : Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
- PP7 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;
- PP8 : Gerakan Membangun Desa;

- PP9 : Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
 PP10 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 PP11 : Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Arah kebijakan Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Pencapaian target indikator makro pembangunan tahun 2023;
- 2) Percepatan pemulihan ekonomi Jawa Barat;
- 3) Penyelesaian isu strategis dan isu kewilayahan;
- 4) Penuntasan prioritas pembangunan daerah melalui program Jabar Juara.

Berdasarkan hasil identifikasi dan telaah terhadap kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, prioritas pembangunan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

Prioritas Nasional (PN):

PN5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Prioritas Provinsi (PP):

PP10 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Prioritas Daerah (PD):

PD4 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Secara Merata.

Prioritas Nasional (PN):

PN6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Prioritas Provinsi (PP):

PP6 : Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana.

Prioritas Daerah (PD):

PD6 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana .

Tabel 3.1
 Identifikasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024
 dengan Prioritas Nasional Tahun 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Provinsi (PP)	Prioritas Daerah (PD)	Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah yang Terkait dengan Renja SKPD
PN1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	PD1 Penurunan Angka Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Prioritas Nasional: PN5 Prioritas Provinsi: PP10 Prioritas Daerah: PD4
PN2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin Pemerataan	PP2 Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	PD2 Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban Serta Politik dan Demokrasi	Prioritas Nasional: PN6 Prioritas Provinsi: PP6 Prioritas Daerah: PD6
PN3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	PD3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, KB, Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Serta Pemuda dan Olah Raga	
PN4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	PD4 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Secara Merata	
PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP5 Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	PD5 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya	

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Provinsi (PP)	Prioritas Daerah (PD)	Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait dengan Prioritas Daerah
PN6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PP6 Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PD6 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana	
PN7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PD7 Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	
	PP8 Gerakan Membangun Desa	PD8 Peningkatan Investasi dan Pendapatan Daerah	
	PP9 Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara		
	PP10 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	PP11 Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata		

Sumber : RKP Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kabupaten Garut

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

Tujuan:

Tersedianya infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, sanitasi dan bangunan yang berkualitas dan memadai dengan berbasis penataan ruang.

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem irigasi dan konservasi sumber daya air;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
5. Meningkatnya kualitas bangunan gedung;
6. Meningkatnya kualitas bangunan dan lingkungan;
7. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan;
8. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;
9. Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang;
10. Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur permukiman.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dirumuskan dalam Perubahan Renja Tahun 2023 merupakan program dan kegiatan pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah

Rumusan program dan kegiatan mempertimbangkan dan diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dalam upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah. Pencapaian visi **“Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”** dituangkan dalam misi yang terkait dengan program, kegiatan serta tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.

Pencapaian misi tersebut adalah sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan, pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana.

2. Pencapaian NSPK dan SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

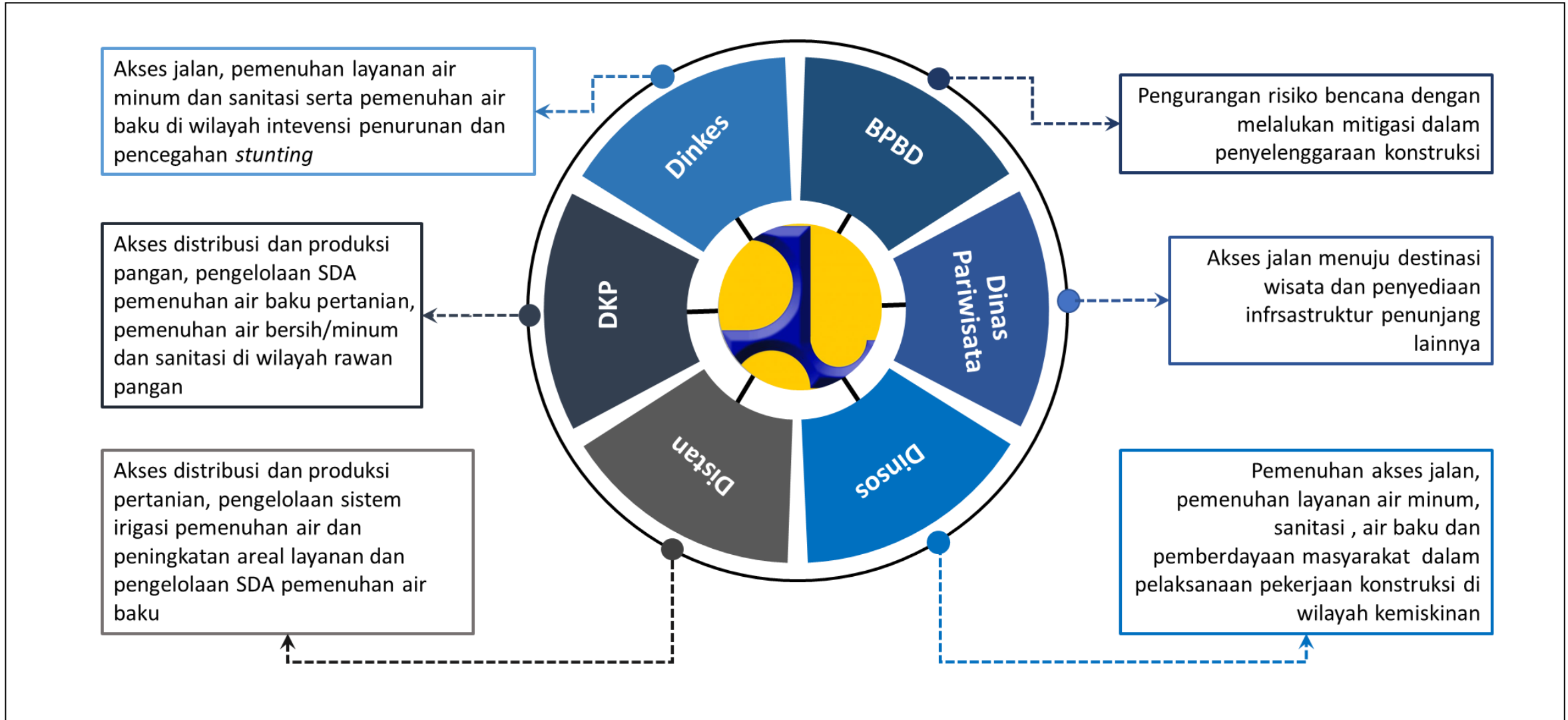
SPM yang ditelaah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Garut menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal.

Berdasarkan Peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai jenis pelayanan dasar penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Sinkronisasi program dan kegiatan prioritas berbagai lintas SKPD dan *stakeholder* yang dirumuskan dalam perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Gambar. 2
Crosscutting Program dan Kegiatan Tahun 2023



Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Perubahan Renja Tahun 2023:

1. Jumlah program sebanyak 10 (sepuluh) program, jumlah kegiatan sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan dan jumlah sub kegiatan sebanyak 50 (lima puluh) sub kegiatan.
2. Lokasi program dan kegiatan berada di wilayah Kabupaten Garut tersebar di 42 (empat puluh dua) kecamatan:
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), difokuskan pada daerah yang mengalami rawan kekeringan dan rawan air baku. Konservasi air pada wilayah-wilayah yang terdapat sumber air tetapi masih belum optimal dalam pemanfaatannya. Pengelolaan irigasi difokuskan pada 38 (tiga puluh delapan) Jaringan Irigasi yang merupakan kewenangan kabupaten.
 - b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah difokuskan pada daerah yang mengalami rawan kemiskinan, kematian ibu dan bayi (AKI/AKB) serta stunting.
 - c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, difokuskan dalam penanganan banjir dan genangan yang diakibatkan oleh kapasitas drainase yang sudah tidak mampu menampung air/*run off*. Lokasi pekerjaan berada di wilayah sekitar perkotaan, antara lain Kecamatan Garut Kota, Kecamatan Tarogong Kidul dan Kecamatan Tarogong Kaler.
 - d. Program Penataan Bangunan Gedung, difokuskan untuk Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
 - e. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, lokasi pelaksanaan program sesuai dengan *grandesign* direncanakan untuk Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya.
 - f. Program Penyelenggaraan Jalan, difokuskan pada ruas jalan yang berada di wilayah perkotaan Garut, pekerjaan lanjutan yang belum tuntas pada tahun sebelumnya, wilayah yang belum terkoneksi antar kecamatan, pemeliharaan jalan, dan ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam.
3. Kerangka Pendanaan (pagu indikatif) dalam Perubahan Renja Tahun 2023 sebesar Rp395.260.833.490,00 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus dengan pagu indikatif perkiraan maju rancangan Tahun 2024 sebesar Rp806.668.208.995,00.

Rumusan Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja secara umum telah sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2023. Hal ini difokuskan untuk pencapaian target Renstra dan kinerja pelayanan yang masih rendah. Pagu indikatif yang terdapat pada rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar Rp395.260.833.490,00 tidak mengalami perubahan, didasarkan dan mempertimbangkan optimalisasi pencapaian target, rasionalisasi/logis sesuai kebutuhan serta penyesuaian anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi, dan sumber-sumber anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pada Perubahan Renja Tahun 2023 terdapat perbedaan nomenklatur indikator kinerja, target dan satuan output sub kegiatan dengan yang tercantum dalam Renstra, hal ini untuk menyesuaikan nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Perubahan Renja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Lembar : 1 dari 21

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024						
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tokol Ukur	Target								
		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum									Sesudah					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										244.106.259.970	395.260.833.490				806.668.208.995				
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										24.006.906.970	26.270.504.673				39.969.610.000			
1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										9.514.200	9.514.200				11.000.000		
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	BB Nilai	BB Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	80 Nilai	80 Nilai	4.801.400	4.801.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi SAKIP	BB Nilai	5.500.000
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	BB Nilai	BB Nilai	4 Laporan	4 Laporan	80 Nilai	80 Nilai	4.712.800	4.712.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi SAKIP	BB Nilai	5.500.000
1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										22.252.363.029	24.404.934.232				34.419.110.000		
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Baik Nilai	Baik Nilai	2832 OB	2832 OB	85 Nilai	85 Nilai	22.247.576.629	24.400.147.832	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik Nilai	34.413.610.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target						
		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum					Sesudah	Sebelum			Sesudah	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Baik Nilai	Baik Nilai	2 Laporan	2 Laporan	85 Nilai	85 Nilai	4.786.400	4.786.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik Nilai	5.500.000
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										421.586.345	369.432.845			1.066.500.000		
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Baik Nilai	Baik Nilai	1 Paket	1 Paket	85 Nilai	85 Nilai	3.597.700	3.597.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik Nilai	15.500.000
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Baik Nilai	Baik Nilai	1 Paket	1 Paket	85 Nilai	85 Nilai	126.608.345	126.608.345	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik Nilai	300.000.000
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Baik Nilai	Baik Nilai	1 Paket	1 Paket	85 Nilai	85 Nilai	69.642.500	69.642.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik Nilai	160.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024							
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target											
		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum					Sesudah	Sebelum			Sesudah						
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Baik Nilai	Baik Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	85 Nilai	85 Nilai	33.380.400	33.380.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik Nilai	75.000.000
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Baik Nilai	Baik Nilai	1 Laporan	1 Laporan	85 Nilai	85 Nilai	28.498.200	24.238.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik Nilai	96.000.000
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Baik Nilai	Baik Nilai	1 Laporan	1 Laporan	85 Nilai	85 Nilai	159.859.200	111.965.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik Nilai	420.000.000
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											30.800.000	30.800.000					2.225.000.000
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Baik Nilai	Baik Nilai	-	-	85 Nilai	85 Nilai	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik Nilai	2.000.000.000
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Baik Nilai	Baik Nilai	1 Unit	1 Unit	85 Nilai	85 Nilai	30.800.000	30.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik Nilai	225.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024						
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target										
		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum					Sesudah									
1	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										845.918.396	909.098.396			1.055.000.000			
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Baik Nilai	Baik Nilai	1 Laporan	1 Laporan	85 Nilai	85 Nilai	96.117.160	96.117.160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik Nilai	225.000.000
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Baik Nilai	Baik Nilai	1 Laporan	1 Laporan	85 Nilai	85 Nilai	5.938.200	5.938.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik Nilai	30.000.000
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Baik Nilai	Baik Nilai	2 Laporan	2 Laporan	85 Nilai	85 Nilai	743.863.036	807.043.036	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik Nilai	800.000.000
1	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										446.725.000	546.725.000			1.193.000.000			
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Baik Nilai	Baik Nilai	125 Unit	125 Unit	85 Nilai	85 Nilai	121.250.000	121.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik Nilai	138.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024						
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target								
		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum									Sesudah					
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Baik Nilai	Baik Nilai	23 Unit	25 Unit	85 Nilai	85 Nilai	325.475.000	425.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik Nilai	605.000.000
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Baik Nilai	Baik Nilai	-	-	85 Nilai	85 Nilai	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik Nilai	450.000.000
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)										21.463.406.000	21.846.415.750				47.450.000.000	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										8.546.000.000	9.085.098.150				30.250.000.000	
1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Persentase Tampung Air yang Tersedia	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Persentase Tampung Air yang Tersedia	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,54%	82,54%	-	-	82,54%	82,54%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tampung Air yang Tersedia	100,00%	1.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024							
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target											
		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum					Sesudah										
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Persentase Tampungan Air yang Tersedia	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Persentase Tampungan Air yang Tersedia	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,54%	82,54%	2 Unit	2 Unit	82,54%	82,54%	400.000.000	398.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tampungan Air yang Tersedia	100,00%	2.500.000.000
1	03	02	2.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Persentase Tampungan Air yang Tersedia	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Persentase Tampungan Air yang Tersedia	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,54%	82,54%	53 Titik	53 Titik	82,54%	82,54%	3.870.000.000	3.831.635.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tampungan Air yang Tersedia	100,00%	5.000.000.000
1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Persentase Tampungan Air yang Tersedia	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Persentase Tampungan Air yang Tersedia	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,54%	82,54%	0,45 Km	0,45 Km	82,54%	82,54%	2.276.000.000	2.862.753.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan		Persentase Tampungan Air yang Tersedia	100,00%	7.500.000.000
1	03	02	2.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Persentase Tampungan Air yang Tersedia	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Persentase Tampungan Air yang Tersedia	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,54%	82,54%	-	-	82,54%	82,54%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tampungan Air yang Tersedia	100,00%	8.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023											Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024								
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)						
				Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target							
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase Tampung Air yang Tersedia	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Persentase Tampung Air yang Tersedia	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,54%	82,54%	22,80 Km	22,80 Km	82,54%	82,54%	2.000.000.000	1.991.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tampung Air yang Tersedia	100,00%	3.000.000.000
1	03	02	2.01	47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Persentase Tampung Air yang Tersedia	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Persentase Tampung Air yang Tersedia	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,54%	82,54%	-	-	82,54%	82,54%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan		Persentase Tampung Air yang Tersedia	100,00%	3.000.000.000
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tampung Air yang Tersedia	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tampung Air yang Tersedia	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,54%	82,54%	-	-	82,54%	82,54%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tampung Air yang Tersedia	100,00%	250.000.000
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota										12.917.406.000	12.761.317.600				17.200.000.000		
1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,40%	84,40%	3 Dokumen	3 Dokumen	84,40%	84,40%	150.000.000	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi	88,04%	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target				
		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum									Sesudah	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,40%	84,40%	8,,38 Km	10,21 Km	84,40%	84,40%	11.767.406.000	11.623.762.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan	Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi	88,04%	12.000.000.000
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,40%	84,40%	26,06 Km	26,06 Km	84,40%	84,40%	1.000.000.000	987.555.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi	88,04%	5.000.000.000
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										15.252.531.000	34.714.442.200			59.800.000.000		
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota										15.252.531.000	34.714.442.200			59.800.000.000		
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Cakupan Air Minum Layak	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang Disusun	Cakupan Air Minum Layak	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,04%	90,04%	-	-	90,04%	90,04%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Air Minum Layak	90,74%	400.000.000
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Cakupan Air Minum Layak	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Cakupan Air Minum Layak	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,04%	90,04%	1022 SR	2993 SR	90,04%	90,04%	3.525.000.000	23.008.131.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan	Cakupan Air Minum Layak	90,74%	25.500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
				Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Cakupan Air Minum Layak	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Cakupan Air Minum Layak	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,04%	90,04%	-	-	90,04%	90,04%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Air Minum Layak	90,74%	16.000.000.000
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Cakupan Air Minum Layak	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Cakupan Air Minum Layak	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,04%	90,04%	-	-	90,04%	90,04%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Air Minum Layak	90,74%	200.000.000
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Cakupan Air Minum Layak	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Kegiatan Perluasan SPAM	Cakupan Air Minum Layak	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,04%	90,04%	3122 SR	3122 SR	90,04%	90,04%	11.727.531.000	11.706.311.000	Bantuan keuangan, DAK Fisik Bidang Air Minum Reguler	Cakupan Air Minum Layak	90,74%	17.700.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024						
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target								
		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum									Sesudah					
1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH										7.517.566.000	6.965.161.800			42.000.000.000			
1	03	05	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota										7.517.566.000	6.965.161.800			42.000.000.000			
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Sanitasi Layak	Jumlah Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Cakupan Sanitasi Layak	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,11%	68,11%	-	-	68,11%	68,11%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Sanitasi Layak	68,53%	200.000.000
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Cakupan Sanitasi Layak	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik	Cakupan Sanitasi Layak	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,11%	68,11%	295 Rumah Tangga	660 Rumah Tangga	68,11%	68,11%	2.700.000.000	2.147.595.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Sanitasi Layak	68,53%	27.000.000.000
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Cakupan Sanitasi Layak	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Cakupan Sanitasi Layak	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,11%	68,11%	570 Rumah Tangga	570 Rumah Tangga	68,11%	68,11%	4.817.566.000	4.817.566.000	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	Cakupan Sanitasi Layak	68,53%	14.800.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024								
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target								
		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum									Sesudah					
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								7.103.000.000	7.589.167.395			8.360.998.995				
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								7.103.000.000	7.589.167.395			8.360.998.995				
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Penurunan Luas Genangan Air	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Persentase Penurunan Luas Genangan Air	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25%	25%			25%	25%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penurunan Luas Genangan Air	0%	100.000.000
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Persentase Penurunan Luas Genangan Air	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Persentase Penurunan Luas Genangan Air	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25%	25%	6427,84 M	111,70 M	25%	25%	-	533.498.995	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penurunan Luas Genangan Air	0%	533.498.995
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Persentase Penurunan Luas Genangan Air	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Persentase Penurunan Luas Genangan Air	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25%	25%	15,58 Km	12,634 Km	25%	25%	7.103.000.000	7.055.668.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penurunan Luas Genangan Air	0%	7.727.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023										Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG										67.775.000.000	8.244.067.540				61.150.000.000		
1	03	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung										67.775.000.000	8.244.067.540				61.150.000.000		
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Teknis Dan Fungsi	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Teknis Dan Fungsi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,45%	9,45%	105 Dokumen	105 Dokumen	9,45%	9,45%	217.700.000	217.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Teknis Dan Fungsi	9,98%	800.000.000
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Teknis Dan Fungsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Teknis Dan Fungsi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,45%	9,45%	16 Dokumen	10 Dokumen	9,45%	9,45%	67.525.000.000	7.994.067.540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Teknis Dan Fungsi	9,98%	60.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023											Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
				Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Teknis Dan Fungsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Teknis Dan Fungsi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,45%	9,45%	100 Dokumen	100 Dokumen	9,45%	9,45%	32.300.000	32.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bangunan Gedung yang Layak Teknis Dan Fungsi	9,98%	250.000.000
1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Teknis Dan Fungsi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Teknis Dan Fungsi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,45%	9,45%	-	-	9,45%	9,45%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bangunan Gedung yang Layak Teknis Dan Fungsi	9,98%	100.000.000
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA											5.185.000.000	4.179.462.217			13.100.000.000		
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota											5.185.000.000	4.179.462.217			13.100.000.000		
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Persentase Luas Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Persentase Luas Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	-	-	20%	20%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Luas Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	30%	1.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023										Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024									
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)						
				Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target							
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Luas Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persentase Luas Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	4 Kawasan	4 Kawasan	20%	20%	5.185.000.000	4.179.462.217	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Luas Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	30%	12.000.000.000
1	03	09	2.01	06	Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Luas Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Luas Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	-	-	20%	20%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Luas Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	30%	100.000.000
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										92.652.850.000	282.531.770.915				527.200.000.000		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										92.652.850.000	282.531.770.915				527.200.000.000		
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Persentase Kemantapan Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,27%	55,27%			55,27%	55,27%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kemantapan Jalan	57,92%	2.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024							
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target											
		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum					Sesudah										
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,27%	55,27%	82.000 M2	82.000 M2	55,27%	55,27%	13.108.007.727	13.108.007.727	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kemantapan Jalan	57,92%	65.000.000.000
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Persentase Kemantapan Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,27%	55,27%	31,03 Km	31,79 Km	55,27%	55,27%	2.500.570.700	30.147.658.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kemantapan Jalan	57,92%	100.000.000.000
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,27%	55,27%	33,65 Km	147,40 Km	55,27%	55,27%	37.308.581.363	139.481.225.383	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan		Persentase Kemantapan Jalan	57,92%	150.000.000.000
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Persentase Kemantapan Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,27%	55,27%	19,957 Km	68,08 Km	55,27%	55,27%	22.456.017.300	77.593.579.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan		Persentase Kemantapan Jalan	57,92%	100.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)						
				Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target					
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Persentase Kemantapan Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,27%	55,27%	100 Km	100 Km	55,27%	55,27%	7.009.847.000	6.946.022.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kemantapan Jalan	57,92%	22.500.000.000
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Persentase Kemantapan Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,27%	55,27%	0,64 Km	974,14 M	55,27%	55,27%	7.854.531.100	11.730.855.295	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan	Persentase Kemantapan Jalan	57,92%	75.000.000.000
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Persentase Kemantapan Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,27%	55,27%	0,15 Km	198,00 M	55,27%	55,27%	1.854.193.000	2.473.755.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan	Persentase Kemantapan Jalan	57,92%	10.000.000.000
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Persentase Kemantapan Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,27%	55,27%	-	-	55,27%	55,27%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kemantapan Jalan	57,92%	1.000.000.000
1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase Kemantapan Jalan	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	Persentase Kemantapan Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,27%	55,27%	0,26 Km	0,26 Km	55,27%	55,27%	561.101.810	1.050.666.810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kemantapan Jalan	57,92%	1.500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023											Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024								
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)						
				Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target							
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
1	03	10	2.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,27%	55,27%	-	-	55,27%	55,27%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kemantapan Jalan	57,92%	100.000.000
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,27%	55,27%	-	-	55,27%	55,27%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kemantapan Jalan	57,92%	100.000.000
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI											1.650.000.000	1.545.075.000			2.237.600.000		
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi											1.150.000.000	1.107.775.000			905.600.000		
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	27,24%	27,24%	96 Orang	96 Orang	27,24%	27,24%	350.000.000	348.272.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	31,04%	302.800.000
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	27,24%	27,24%	42 Orang	42 Orang	27,24%	27,24%	175.000.000	174.342.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	31,04%	402.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024							
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target											
		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum					Sesudah										
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	27,24%	27,24%	155 Orang	155 Orang	27,24%	27,24%	625.000.000	585.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	31,04%	200.000.000
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										300.000.000	300.000.000				1.105.600.000		
1	03	11	2.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	27,24%	27,24%	-	-	27,24%	27,24%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	31,04%	150.000.000
1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	27,24%	27,24%	1 Dokumen	1 Dokumen	27,24%	27,24%	100.000.000	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	31,04%	252.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023											Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024							
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)					
				Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1	03	11	2.02	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	27,24%	27,24%	2 Dokumen	2 Dokumen	27,24%	27,24%	200.000.000	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	31,04%	452.800.000
1	03	11	2.02	09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	27,24%	27,24%	-	-	27,24%	27,24%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Bersertifikat	31,04%	250.000.000
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi											200.000.000	137.300.000				226.400.000
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Proyek Tanpa Kecelakaan Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Proyek Tanpa Kecelakaan Konstruksi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	200.000.000	137.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Proyek Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100%	226.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024							
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target											
		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum					Sesudah										
1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG										1.500.000.000	1.374.766.000			5.400.000.000				
1	03	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota										1.270.980.400	1.222.696.400			4.600.000.000				
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,00%	84,00%	10 Dokumen	10 Dokumen	84,00%	84,00%	1.270.980.400	1.222.696.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	84,50%	4.000.000.000
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,00%	84,00%	-	-	84,00%	84,00%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	84,50%	600.000.000
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										97.625.200	58.925.200			400.000.000			
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,00%	84,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	84,00%	84,00%	97.625.200	58.925.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	84,50%	400.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024							
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target											
		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum					Sesudah	Capaian Program			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
1	03	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										131.394.400	93.144.400				400.000.000			
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,00%	84,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	84,00%	84,00%	131.394.400	93.144.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	84,50%	400.000.000
TOTAL										244.106.259.970	395.260.833.490				806.668.208.995							

Sumber : SIPD

Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pendanaan yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendukung prioritas pembangunan daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada Perubahan Renja Tahun 2023 dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari 10 (sepuluh) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Merupakan program penunjang pelaksanaan fungsi dinas yang dilaksanakan oleh Sekertariat. Pagu indikatif sebesar Rp26.270.504.673,00 mengalami penambahan sebesar Rp2.263.597.703,00 dari pagu semula sebesar Rp24.006.906.970,00. Penambahan pagu tersebut di atas untuk Penyesuaian Gaji dan Tunjangan ASN, kekurangan untuk pembayaran honorarium Tenaga Kontrak Kerja serta kegiatan pemeliharaan rutin lainnya.

Capaian program terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Nilai Evaluasi SAKIP dengan target Nilai BB dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target Nilai Baik. Terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan:
 - (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - (2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan:
 - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan:
 - (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - (3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - (4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - (5) Fasilitas Kunjungan Tamu; dan
 - (6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan:
 - (1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan:
 - (1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - (2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - (3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan:
 - (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - (2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Merupakan program yang dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air, Pagu indikatif sebesar Rp21.846.415.750,00 mengalami penambahan sebesar Rp383.009.750,00 dari pagu semula sebesar Rp21.463.406.000,00. Penambahan pagu untuk pembayaran sisa pekerjaan yang belum selesai pada Tahun 2022 (Luncuran Tahun 2022).

Target capaian program terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase Tampung Air yang Tersedia sebesar 82,54% dan Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi sebesar 84,40%. Terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan:

- 1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
 - (1) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;
 - (2) Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku;
 - (3) Pembangunan Tanggul Sungai; dan
 - (4) Normalisasi/Restorasi Sungai.
- 2) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
 - (1) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa;
 - (2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan; dan
 - (3) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Merupakan program yang dilaksanakan oleh Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman. Pagu indikatif sebesar Rp34.714.442.200,00 mengalami penambahan sebesar Rp19.461.911.200,00 dari pagu semula sebesar Rp15.252.531.000,00. Penambahan pagu disebabkan oleh adanya Bantuan Keuangan Provinsi.

Target capaian program adalah Cakupan Air Minum Layak sebesar 90,04%. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
 - (1) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan; dan
 - (2) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Merupakan yang dilaksanakan oleh Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman. Pagu indikatif sebesar Rp6.965.161.800,00 mengalami pengurangan sebesar Rp552.404.200,00 dari pagu semula sebesar Rp7.517.566.000,00. Pengurangan pagu disebabkan oleh adanya paket pekerjaan yang beralih ke SKPD lain, efisiensi pada belanja perjalanan dinas dan adanya perpindahan ke sub kegiatan lain.

Target capaian program adalah Cakupan Sanitasi Layak sebesar 68,11%. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
 - (1) Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat;
 - (2) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Merupakan yang dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air. Pagu indikatif sebesar Rp7.589.167.395,00 mengalami penambahan sebesar Rp486.167.395,00 dari pagu semula sebesar Rp7.103.000.000,00. Penambahan pagu untuk pembayaran sisa pekerjaan yang belum selesai pada Tahun 2022 (Luncuran Tahun 2022).

Target capaian program adalah Persentase Penurunan Luas Genangan Air sebesar 25%. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
 - (1) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan; dan
 - (2) Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan.

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Merupakan program yang dilaksanakan oleh Bidang Bangunan. Pagu semula sebesar Rp67.775.000.000,00 mengalami pengurangan sebesar Rp8.244.067.540,00 sehingga menjadi Rp59.530.932.460,00 dari pagu semula sebesar Rp67.775.000.000,00. Pengurangan pagu disebabkan beralihnya pekerjaan ke SKPD lain, antara lain pekerjaan-pekerjaan bangunan SOR RAA Adiwijaya (Ciuteul).

Target capaian program adalah Persentase Bangunan Gedung yang Layak Teknis dan Fungsi sebesar 9,45%. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Sub Kegiatan:
 - (1) Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG;
 - (2) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - (3) Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota.

7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Merupakan program yang dilaksanakan oleh Bidang Bangunan. Pagu indikatif sebesar Rp4.179.462.217,00 mengalami pengurangan sebesar Rp1.005.537.783,00 dari pagu semula sebesar Rp5.185.000.000,00. Pengurangan pagu disebabkan beralihnya pekerjaan ke SKPD lain, antara lain pekerjaan penataan lingkungan di sekitar SOR RAA Adiwijaya (Ciateul).

Target capaian program adalah Persentase Luas Bangunan dan Lingkungan yang Tertata sebesar 20%. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
 - (1) Penataan Bangunan dan Lingkungan.

8. Program Penyelenggaraan Jalan

Merupakan program yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Marga. Pagu indikatif sebesar Rp282.531.770.915,00 mengalami penambahan sebesar Rp189.878.920.915,00 dari pagu semula sebesar Rp92.652.850.000,00. Penambahan pagu disebabkan oleh adanya Bantuan Keuangan Provinsi, lanjutan pekerjaan yang belum selesai pada Tahun 2022 (Luncuran Tahun 2022) dan penanganan infrasastruktur jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam.

Target capaian program adalah Persentase Kemantapan Jalan sebesar 55,27%. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
 - (1) Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan;
 - (2) Pembangunan Jalan;
 - (3) Rekonstruksi Jalan;
 - (4) Rehabilitasi Jalan;
 - (5) Pemeliharaan Rutin Jalan;

- (6) Pembangunan Jembatan;
- (7) Rehabilitasi Jembatan; dan
- (8) Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat.

9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Merupakan program yang dilaksanakan oleh Bidang Jasa Konstruksi. Pagu indikatif sebesar Rp1.545.075.000,00 mengalami pengurangan sebesar Rp104.925.000,00 dari pagu semula sebesar Rp1.650.000.000,00. Pengurangan pagu disebabkan adanya efisiensi pada belanja perjalanan dinas dan belanja makan minum.

Target capaian program terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Terlatih dan Bersertifikat sebesar 27,24% dan Persentase Proyek Tanpa Kecelakaan Konstruksi sebesar 100%. Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Sub Kegiatan:
 - (1) Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;
 - (2) Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi; dan
 - (3) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi.
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
 - (1) Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan; dan
 - (2) Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi.
- 3) Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, Sub Kegiatan:
 - (1) Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.

10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Merupakan program yang dilaksanakan oleh Bidang Penataan Ruang, pagu indikatif sebesar Rp1.374.766.000,00 mengalami pengurangan sebesar Rp125.234.000,00 dari pagu semula sebesar Rp1.500.000.000,00. Pengurangan pagu disebabkan adanya efisiensi pada belanja perjalanan dinas dan belanja makan minum.

Target capaian program adalah Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang sebesar 84%. Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan:

- 1) Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
 - (1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota.

- 2) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
 - (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah.

- 3) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
 - (1) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

3.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023

Berkenaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab terhadap 2 (dua) jenis pelayanan dasar, meliputi penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan jenis pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Target capaian pada Perubahan Renja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target Nasional	Target Tahun 2023	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100%	100%	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Dinas PUPR Tahun 2019-2024

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2023 ditujukan untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai sifat strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Perubahan Renja Tahun 2023 masih terdapat hambatan dalam ketersediaan sarana, prasarana, dan Sumber Daya Manusia. Adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, akan diusulkan pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2023.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2023, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN